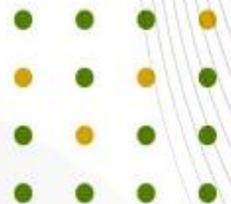




# RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika  
Pemerintah Kota Bogor





WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapperida adalah Kepala Bapperida Kota Bogor.

## BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
  - a. dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2025 yang dimulai pada 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
  - b. penjabaran dari RKPD Kota Bogor Tahun 2025 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan Penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:

- a. mewujudkan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang mendukung visi dan misi daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

### BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

#### Pasal 3

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB V PENUTUP

### BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota Bogor yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

- b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap renja perangkat daerah;
- b. Kepala Bapperida menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi renja Perangkat Daerah; dan
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

### BAB VI PENUTUP

#### Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari Renja:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- o. Dinas Tenaga Kerja;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

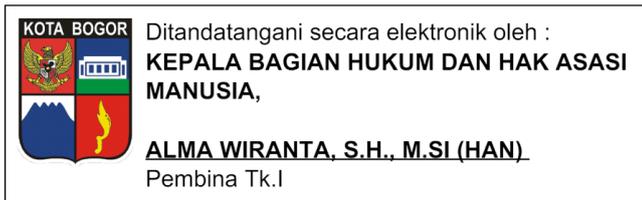
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Pendapatan Daerah;
- cc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Kecamatan Bogor Tengah;
- ee. Kecamatan Bogor Selatan;
- ff. Kecamatan Bogor Barat;
- gg. Kecamatan Bogor Utara;
- hh. Kecamatan Bogor Timur; dan
- ii. Kecamatan Tanah Sareal.

#### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,  
TTD.  
HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 Juli 2024

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025

## BAB I PENDAHULUAN

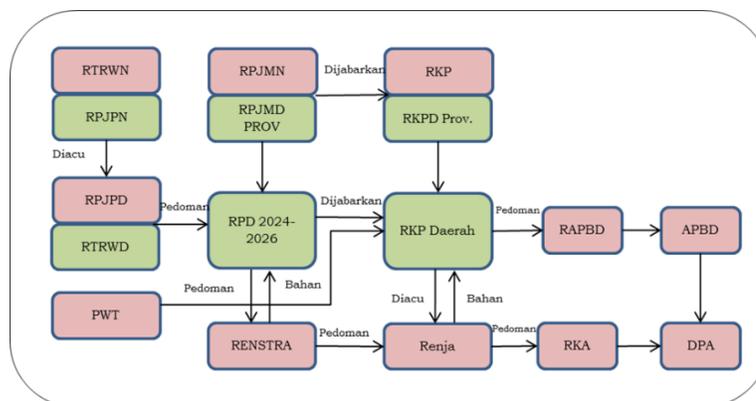
### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025 merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan provinsi. Oleh karena itu substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor.

Penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang erupakan masa transisi sebelum ditetapkannya Wali Kota Bogor yang definitife pada Tahun 2026.

Keterkaitan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rancangan Renja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan serta pendanaan dalam Renja 2025 disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. program prioritas yang tertuang dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Selanjutnya Renja Diskominfo Kota Bogor tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo Kota Bogor tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo Kota Bogor untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 5 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Noreg Peraturan Daerah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat: (5/49/2022));
32. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6);
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
34. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 42).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor tahun 2025 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Diskominfo Kota Bogor.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Diskominfo Kota Bogor tahun 2025 adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Diskominfo Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025).

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Diskominfo Kota Bogor Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Diskominfo Kota Bogor yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah**, Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Kota Bogor tahun lalu dan capaian Renstra Diskominfo, Analisis kinerja pelayanan Diskominfo, Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bogor, Reviu terhadap rancangan awal dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan yaitu telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Diskominfo Kota Bogor, serta perencanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Bogor.

**Bab VI Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**Bab V Penutup**, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2023**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR**

**Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Kota Bogor tahun lalu**

Pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor secara umum telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja, dengan hasil capaian akhir kegiatan “baik” dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 97,67% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh tujuh persen).

Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor berdasarkan APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2023 dengan capaian sebesar Rp 21.890.465.867,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus Sembilan puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau dengan persentase sebesar 97,67% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh tujuh persen) dari yang dianggarkan sebesar Rp. 22.412.547.528,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dari Komponen Belanja Daerah dijelaskan sebagai berikut:

**Belanja Operasi** alokasi anggaran sebesar Rp 22.412.547.528,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), terealisasi Rp 21.890.465.867,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus Sembilan puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau dengan persentase sebesar 97,67% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh tujuh persen) terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai, alokasi anggaran sebesar Rp. 10.520.261.371,00 (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) terealisasi Rp 10.056.662.932,00 (Sepuluh milyar lima puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)

atau dengan persentase sebesar 95,59% (Sembilan puluh lima koma lima puluh sembilan persen).

- 2) Belanja Barang dan Jasa, alokasi anggaran sebesar Rp. 11.892.286.157,00 (Sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), terealisasi Rp 11.833.802.935,00 (Sebelas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,51% (Sembilan puluh sembilan koma lima puluh satu persen).

Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2023 secara ringkas tertuang dalam tabel 2.1. sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja**

URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22.412.547.528,00</b>	<b>21.890.465.867,00</b>	<b>97,67</b>
Belanja Pegawai	10.520.261.371,00	10.056.662.932,00	95,59
Belanja Barang dan Jasa	11.892.286.157,00	11.833.802.935,00	99,51
<b>JUMLAH</b>	<b>22.412.547.528,00</b>	<b>21.890.465.867,00</b>	<b>97,67</b>

Sumber : Diskominfo Tahun 2023

Adapun realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2023 tertuang dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2023 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.941.030.411</b>	<b>12.434.148.946</b>	<b>96,08</b>
<b>1</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.750.400	9.750.400	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.750.400	9.750.400	100
<b>2</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.255.361.371	9.792.242.932	95,48
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.255.361.371	9.792.242.932	95,48
<b>3</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.666.400	341.711.219	99,72

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.126.000	6.069.100	99,07
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.321.400	104.083.778	99,77
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.464.000	14.295.000	99,83
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.755.000	217.263.341	99,77
<b>4</b>	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.065.832.240	2.034.736.751	98,49
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000	2.560.791	51,22
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.060.832.240	2.032.175.960	98,61
<b>6</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.420.000	255.707.644	95,62
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.830.000	213.345.644	94,89
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.590.000	42.362.000	99,46
	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>4.891.133.283</b>	<b>4.881.104.944</b>	<b>99,79</b>
<b>7</b>	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.891.133.283	4.881.104.944	99,79
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	964.251.083	963.012.114	99,87
	Pelayanan Informasi Publik	346.979.200	338.529.830	97,56
	Layanan Hubungan Media	3.579.903.000	3.579.563.000	99,99
	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>4.348.712.434</b>	<b>4.344.441.379</b>	<b>99,90</b>
<b>8</b>	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.051.523.600	3.050.907.564	99,98
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/ Kabupaten	66.000.000	65.867.400	99,80
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.985.523.600	2.985.040.164	99,98
<b>9</b>	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.297.188.834	1.293.533.815	99,72
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	306.931.834	306.815.559	99,96
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	37.239.400	37.239.400	100
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	527.436.000	524.470.812	99,44
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	-	-	0

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	354.165.600	353.753.044	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	71.416.000	71.255.000	100
	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>137.571.400</b>	<b>136.788.998</b>	<b>99,43</b>
10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	137.571.400	136.788.998	99,43
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	2.839.200	2.721.600	95,86
	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	45.255.600	45.255.600	100
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	39.084.000	38.527.198	98,58
	Pengembangan Infrastruktur	50.392.600	50.284.600	99,79
	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>94.100.000</b>	<b>93.981.600</b>	<b>99,87</b>
11	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	94.100.000	93.981.600	99,87
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	94.100.000	93.981.600	98,30
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.412.547.528</b>	<b>21.890.465.867</b>	<b>97,67</b>

Sumber : Diskominfo Tahun 2023

Berdasarkan Tabel di atas, secara umum Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2023 mencapai 97,67%, dimana hampir semua sub kegiatan mencapai realisasi di atas 90%. Namun terdapat 1 sub kegiatan yang capaian realiasisi di bawah 90% dengan alasan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, tidak ada realisasi disebabkan kegiatan mengalami refocusing pengurangan anggran.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi sebesar 51,22%.

Target realisasi tidak tercapai disebabkan penyerapan anggaran disesuaikan dengan pembayaran tagihan jasa telpon disesuaikan dengan kebutuhan.

### **Capaian Renstra Diskominfo Tahun 2023**

Target capaian kinerja Renstra dan realisasi Target Kinerja Renstra sampai dengan tahun 2023 dijelaskan dalam tabel 2.3. sebagai berikut :

**Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor s/d Tahun 2023**

kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)	
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika</b>											
2	16	1										
		Program: penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	nilai	A	A	A	A	100	A	A	100
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	point	3,55	3,4	3,45	3,53	102,31	3,55	4,55	100
2	16	1	2	1								
		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	nilai	A	A	A	A	100	A	A	100
2	16	1	2	1	1							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	4	7	7	100	7	7	100
2	16	1	2	1	6							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	NA	NA	NA	NA	3	3	100
2	16	1	2	1	7							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	NA	NA	NA	NA	3	3	100
2	16	1	2	2								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	101,45	101,45	100	100	100

kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)
2 16 1 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	700	686	686	696	101,45	700	700	100
2 16 1 2 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	348	NA	NA	NA	NA	348	348	100
2 16 1 2 2 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksa	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 1 2 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	NA	NA	NA	NA	100	100	100
2 16 1 2 3 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 1 2 3 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 1 2 3 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	NA	NA	NA	NA	12	12	100
2 16 1 2 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	%	100	NA	NA	NA	NA	100	100	100
2 16 1 2 5 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 1 2 5 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100

kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)
2 16 1 2 5 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 1 2 5 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 1 2 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	NA	NA	NA	NA	50	50	100
2 16 1 2 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	NA	NA	NA	NA	50	50	100
2 16 1 2 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2 16 1 2 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	1	1	100	1	1	100
2 16 1 2 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	7	7	100	4	4	100
2 16 1 2 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	1	1	100	1	1	100
2 16 1 2 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 1 2 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100

kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)
2 16 1 2 6 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 1 2 6 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 1 2 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	%	100	100	NA	NA	NA	100	100	100
2 16 1 2 7 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 1 2 7 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	NA	NA	NA	NA	2	2	100
2 16 1 2 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	8	NA	NA	NA	5	5	100
2 16 1 2 7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	NA	NA	NA	4	4	100
2 16 1 2 7 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	NA	NA	NA	NA	-	-	100
2 16 1 2 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)
2 16 1 2 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 1 2 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
2 16 1 2 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
2 16 1 2 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Barang Milik Daerah yg terpelihara sesuai RPBMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2 16 1 2 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	13	13	100	13	13	100
2 16 1 2 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	50	50	100	50	50	100
2 16 1 2 9 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 2	Program : Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi publik	Lvel	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	100
2 16 2 2 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	100	90	95	97	102,1	100	100	100

kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)					
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)				
		Persentase PD yang aktif menyebarkan-luaskan informasi melalui media sosial dan website	%	68	100	67	67	100	68	68	100				
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	100	93,6	95	95	100	100	100	100				
		Persentase PPID PD yang aktif	%	100	90	95	95	100	100	100	100				
2	16	2	2	1	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	1	NA	NA	NA	1	1	100	
2	16	2	2	1	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	1	NA	NA	NA	1	1	100	
2	16	2	2	1	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	NA	NA	NA	1	1	100	
2	16	2	2	1	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	NA	NA	NA	1	1	100	
2	16	2	2	1	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	3	4	1	1	100	3	3	100
2	16	2	2	1	6	Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	2	3	3	100	1	1	100
2	16	2	2	1	7	Layanan Hubungan Media	Layanan	4	4	4	4	100	4	4	100

kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)
2 16 2 2 1 8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 2 2 1 9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 2 2 1 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	10	NA	NA	NA	NA	10	10	100
2 16 2 2 1 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2 16 2 2 1 13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	20	NA	NA	NA	NA	20	20	100
2 16 3	Program: Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Index	3,7	3,5	3,2	3,70	115,62	3,7	3,7	100
		Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Index	3,3	1,7	3,2	3	93,75	3,3	3,3	100
		Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	index	3,5	2,5	3,3	3,5	106,06	3,5	3,5	100
		Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Index	3	1	2,9	2,88	99,31	3	3	100
2 16 3 2 1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup	Persentase Pengeloa-laan Domain, Sub Domain, dan IP Address milik Peme-rintah Kota Bogor	%	100	100	100	100	100	100	100	100

kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)							
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)						
	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor	%	100	100	100	100	100	100	100	100						
		Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level	Level 4	5	4	3	75	Level 4	Level 4	100						
		Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	level	Level 4	3	4	3	75	Level 4	Level 4	100						
2	16	3	2	1	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	1	NA	NA	NA	2	2	100		
2	16	3	2	1	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota/ Kabupaten	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	100	1	1	100	
2	16	3	2	1	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	138	138	138	152	110,14	138	138	100	
2	16	3	2	2		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	level	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 4	3	3	4	133,33	level 4	level 4	100	
							level	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level 4	level 4	2	3	3	100	level 4	level 4	100
							level	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	level 4	level 4	3	3	4	133,33	level 4	level 4	100

kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	level	level 4	4	3	4	133,33	level 4	level 4	100
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	level	level 4	4	3	4	133,33	level 4	level 4	100
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level	level 4	3	3	3	100	level 4	level 4	100
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level	level 4	3	3	4	133,33	level 4	level 4	100
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	level	level 4	1	3	4	133,33	level 4	level 4	100
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	level	level 4	4	3	4	133,33	level 4	level 4	100
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	level	level 4	4	3	3	100	level 4	level 4	100
		Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level	level 4	1	3	3	100	level 4	level 4	100

kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)						
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)					
		Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level	level 4	1	3	3	100	level 4	level 4	100					
		Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	level	level 4	2	3	3	100	level 4	level 4	100					
		Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	level	level 4	3	3	3	100	level 4	level 4	100					
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	level	level 4	1	3	3	100	level 4	level 4	100					
		Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	level	level 3	2	3	3	100	level 3	level 3	100					
		Tingkat kematangan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TI dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tahun	1	1	1	1	100	1	2	100					
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	level	level 3	1	3	3	100	level 3	level 3	100					
		Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	level	level 4	4	3	4	133,33	level 4	level 4	100					
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	level	level 3	3	2	4	200	level 3	level 3	100					
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	level	level 4	1	3	3	100	level 4	level 4	100					
		Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	level	level 4	2	3	3	100	level 4	level 4	100					
2	16	3	2	2	1	Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan	Dokumen	2	NA	NA	NA	NA	2	2	100

kode Rekening	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)						
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)					
	dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota														
2	16	3	2	2	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	2	2	NA	NA	NA	2	2	100
2	16	3	2	2	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	4	1	1	1	100	4	4	100
2	16	3	2	2	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
2	16	3	2	2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	1	-	NA	NA	NA	1	1	100
2	16	3	2	2	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	5	NA	NA	NA	NA	5	5	100
2	16	3	2	2	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	8	4	2	3	150	8	8	100
2	16	3	2	2	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	19	4	NA	NA	NA	19	19	100
2	16	3	2	2	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplemen-	Dokumen	4	1	NA	NA	NA	4	4	100

kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)						
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)					
	Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	tasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City														
2	16	3	2	2	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	3	1	1	1	100	3	3	100
2	16	3	2	2	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	1	1	100
2	16	3	2	2	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	2	1	1	1	100	2	2	100
						<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik</b>										
2	20	2				Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	89	86	84	88	104,76	89	89	100
							Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	6	1,03	2	5,96	298	6	6	100
2	20	2	2	1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yg menyediakan data statistik sektoral sesuai dengan standar	%	89	86	84	88	104,76	89	89	100
							Jumlah Data Statistik Sektoral yang disajikan	%	89	86	84	88	104,76	89	89	100
							Pemenuhan hardware dan software sesuai kebutuhan kebutuhan, pengolahan data	paket	1	1	1	1	100	1	1	100

kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)
2 20 1 1 1 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	2	1	1	100	1	1	100
2 20 2 2 1 2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	80	0	72	60	83,33	80	80	100
2 20 2 2 1 3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
2 20 2 2 1 4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	80	0	NA	NA	NA	80	80	100
2 20 2 2 1 5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	2	1	1	1	100	2	2	100
2 20 3 3 1 6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	0	NA	NA	NA	1	1	100
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian</b>										
2 21 2	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	Level 2	Level 2	2	2	100	Level 2	Level 3	100
2 21 2 2 1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar Indeks KAMI	%	83	81	82	81	98,7	83	83	100
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Kebijakan	1	1	1	1	100	1	1	100
2 21 2 2 1 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	100

kode Rekening	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)						
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)					
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan														
2	21	2	2	1	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	100
2	21	2	2	1	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	4	1	1	1	100	4	2	100
2	21	2	2	1	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	36	NA	NA	NA	NA	36	NA	100
2	21	2	2	2		Penetapan Pola Hubungan Kamu-nikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase PD yang aktif menggunakan komunikasi sandi (email kota bogor)	%	46,14	NA	NA	NA	NA	46,14	46,14	100
2	21	2	2	2	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	14	NA	NA	NA	NA	14	14	100

Sumber : Diskominfo Tahun 2023

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator anggaran belanja tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah tercapai baik dengan tingkat capaian sebesar 97,67% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh tujuh persen).

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4. sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor**

No	Urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
<b>I INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)</b>										
1	Persentase penyediaan data Statistik Sektoral	%	76	79	84	89	85	88	89	
2	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	
3	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	nilai	NA	80,01	81	87,5	71,02	87,42	87,5	
4	Nilai Indeks Evaluasi SPBE	Index	2,97	2,98	2,98	3,72	2,75	3,72	3,72	
5	IKM layanan pengaduan masyarakat	%	80	82	85	85,5	85	85,41	85,5	
<b>II INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>										
<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	74	81	95	100	90	94	100	
2	Hasil Penilaian SPBE	Index	2,97	2,98	2,98	3,72	3,72	3,72	3,72	
3	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	%	21	28	34	41	30	37	41	
4	Persentase Keterbukaan Informasi public	%	100	100	100	100	79,8	100	100	
5	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	86,4	100	
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	%	73,57	74,45	74,7	86,08	85,85	86,07	86,08	
<b>URUSAN STATISTIK</b>										
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Buku "Kota Bogor Dalam Angka"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Buku "PDRB"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	Urusan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
<b>URUSAN PERSANDIAN</b>										
1	Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah	%	30	60	85	90	81	86	90	
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	50	81	82	83	81	81	83	
<b>III INDIKATOR PROGRAM</b>										
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	76	79	84	89	86	88	89	
2	Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	0,2	0,3	2	6	1,3	5,96	6	
3	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	nilai	BB	A	A	A	A	A	A	
5	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	point	NA	3,4	3,52	3,55	3,4	3,53	3,55	
6	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Index	2,71	2,72	3,2	3,7	3,1	3,5	3,7	
7	Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Index	3,0	3,1	3,2	3,3	2,5	3,3	3,3	
8	Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	index	2,33	2,34	3,3	3,5	3,25	3,5	3,5	
9	Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Index	2,7	2,8	2,9	3,0	2,63	3	3,0	
10	Nilai Keterbukaan Informasi publik	Level	63	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	

Sumber : Diskominfo Tahun 2023

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Diskominfo Kota Bogor sebagai Perangkat Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun secara eksternal sebagaimana dijelaskan dalam ateb1 berikut:

**Tabel 2.5. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Penyelenggaraan e-Government belum optimal	Tingkat keberlangsungan layanan pusat data belum stabil	Infrastruktur pusat data belum memenuhi standarisasi tier pusat data

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya penyelenggaraan aplikasi di Kota Bogor	Semakin kompleksnya penyelenggaraan aplikasi
		Belum seluruh unit kerja di Kota Bogor mendapatkan layanan jaringan infrastruktur telekomunikasi oleh pemerintah kota	Dari 377 unit kerja, baru terpasang jaringan FO sebanyak 141 titik. Layanan konektivitas dan jaringan belum stabil (bandwidth belum mencukupi).
		Belum semua PPID pelaksana melaksanakan keterbukaan informasi publik	Adanya rasa takut pejabat informasi publik terhadap dampak dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2	Belum optimalnya penyelenggaraan Statistik Sektoral	Belum terpenuhinya kualitas data sesuai standar yang berlaku	Dalam penetapan aspek kualitas dan ketepatan waktu belum menggunakan standar/pedoman yang sama
3	Adanya ancaman terhadap keamanan aset informasi	Terjadinya insiden siber	Masih terdapat banyak celah kerentanan pada perangkat keamanan informasi

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Terhadap akar permasalahan yang dihadapi, terdapat factor pendorong dan factor penghambat sebagai berikut :

**Tabel 2.6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Permasalahan**

NO	AKAR MASALAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Infrastruktur pusat data belum memenuhi standarisasi tier pusat data	Sudah diamanatkan dalam Perwali No. 62 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan SPBE bahwa Diskominfo wajib menyelenggarakan dan menyediakan layanan pusat data dan pusat pemulihan data sesuai dengan standar yang berlaku	Pengalokasian anggaran tidak memenuhi prinsip <i>money follow function</i>
2	Semakin kompleksnya penyelenggaraan aplikasi	Sudah dimulai standarisasi dan integrasi	Jumlah dan kapasitas SDM yang tersedia berbasis spesifik softskill talenta digital belum seimbang
3	Dari 377 unit kerja, baru terpasang jaringan FO sebanyak 141 titik.	Sudah diamanatkan dalam Perda No.9 Tahun 2018 dan Rencana Induk SPBE Tahun 2022-2027 bahwa Diskominfo wajib menyelenggarakan simpul dan jaringan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Pengalokasian anggaran tidak memenuhi prinsip <i>money follow function</i>
4	Layanan konektivitas dan jaringan belum stabil (bandwidth belum mencukupi).		

NO	AKAR MASALAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
5	Adanya rasa takut pejabat informasi publik terhadap dampak dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Sudah diamanatkan dalam Perwali No. 70 Tahun 2022 tentang layanan informasi publik	Penyalahgunaan informasi
6	Dalam penetapan aspek aktualias dan ketepatan waktu belum menggunakan standar/ pedoman yang sama	Perwali No.147 Tahun 2019 tentang Satu Data Kota bogor	SDM pada perangkat daerah belum memahami tentang prinsip satu data
7	Masih terdapat banyak celah kerentanan pada perangkat keamanan informasi	Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021, Perwali No. 23 Tahun 2021 tentang SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)	Pengalokasian anggaran tidak memenuhi prinsip <i>money follow function</i> dan jumlah SDM yang belum sesuai kebutuhan

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam mencapai tujuan dan asasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah strategi dan kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 2.7. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Mengimplementasikan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan dan terukur	Mewajibkan seluruh PPK dan PPTK untuk menyusun dan mengunggah laporan kinerja dan keuangan secara berkala pada SIPD, SIMRAL Kota Bogor, dan sistem monitoring dan evaluasi yang diwajibkan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Merumuskan dan mengimplementasikan inovasi/upaya peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan publik	Mengalokasikan dana secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi public	Melaksanakan monitoring dan evaluasi PPID secara berkala	Mewajibkan seluruh PPID pelaksana untuk mempublikasikan informasi melalui web PPID masing-masing perangkat daerah
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan kestabilan pelayanan pusat data	1. Mengoptimalkan layanan pusat data nasional 2. Mempertahankan dan meningkatkan layanan pusat data

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			dengan collocation 3. Mendorong pembangunan pusat data mandiri
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola kelembagaan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM talenta digital
	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan data statistik sektoral	Melakukan reviu dan evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral secara berkala serta ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas secara berkesinambungan.	Menyusun regulasi perwali tentang penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Bogor
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Menerapkan standar nasional (SNI 27001) untuk keamanan informasi	Mewajibkan seluruh perangkat daerah untuk menerapkan perwali No. 23 Tahun 2021 tentang SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

#### 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD sebagai panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan metode teknokratik dan partisipatif.

Pada Rancangan awal RKPD, pagu indikatif pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebesar Rp. 51.326.630.591,- yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga pagu indikatifnya menjadi Rp. 23.813.647.049,-. Selain hal tersebut, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor juga mengalami pemukhtahiran kode rekening, nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 2.5. berikut ini:

**Tabel 2.8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Bogor**

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I	Program: penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Diskominfo Kota Bogor	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	27,57	48.728.000	Program: penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Diskominfo Kota Bogor	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	27,57	8.392.800	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah				
			Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	27,00				Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	27,00						
			Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	11,65				Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	11,65						
			Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	22,50				Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	22,50						
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%	100				Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%	100						
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	100	13.364.868.000			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	100	12.557.744.983		Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah			
			Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	94				Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	94						
			Persentase kepatuhan anggaran	%	100				Persentase kepatuhan anggaran	%	100						
			Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	%	95				Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	%	95						
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	%	94				Transparansi pengelolaan keuangan daerah	%	94						
			Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Nilai	85,00	7.763.999.991			Program: penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Diskominfo Kota Bogor	Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Nilai			85,00	3.439.713.544	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	81,25						Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai			81,25		
			Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	Nilai	82,50						Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	Nilai			82,50		
			Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	95,00						Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai			95,00		
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	48.728.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	8.392.800	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah				
			Persentase realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	%	95				Persentase realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	%	95						
			Persentase realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	%	95				Persentase realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	%	95						
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	14.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	8.392.800					
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Laporan	3	34.728.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Laporan	3	0					

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
I.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	0	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	13.364.868.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	12.557.744.983	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	65	13.305.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	65	12.490.891.783	
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	
I.2.3	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaa		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaa	Dokumen	1	0	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaa		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaa	Dokumen	1	0	
I.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	59.868.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	66.853.200	
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	0	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
I.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	0	
I.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	
I.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	100.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	0	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
I.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	
I.4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	
I.4.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	
I.4.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	65	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	65	0	
I.4.5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	65	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	65	0	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1.185.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	334.327.217	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.117.600	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	105.000.000	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.494.617	
1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	207.715.000	
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	
1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	3.600.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	
1.6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	450.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	62	2.600.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	62	0	
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	300.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	171	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	171	0	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	2.389.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	2.721.127.032	Disediakan dengan kebutuhan
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	9.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	9.000.000	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.380.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.712.127.032	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	489.999.991	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	384.259.295	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
I.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	320.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	232.968.910	
I.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	70.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	151.290.385	
I.8.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	99.999.991	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	0	
II	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo Kota Bogor	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	93	6.416.174.500	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo Kota Bogor	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	93	2.638.671.810	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	%	80				Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	%	80		
II.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan website	%	100	6.416.174.500	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media internal, media sosial dan website	%	100	2.638.671.810	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	94				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD	%	94		
			Tingkat Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR)	%	93				Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	%	93		
			Persentase PPID PD yang aktif	%	90				Persentase PPID PD yang aktif	%	90		
			Jumlah rilis berita	Tayang	1600				Jumlah Kemitraan Media Cetak, Online, Radio dan TV	Tayang	500		
			Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	90				Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%	90		
II.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	1	50.000.000	Relasi Media	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	12	0	
II.1.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	1	90.000.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	68	0	
II.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4	770.234.500	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	10	0	
II.1.4	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	4	458.000.000	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	100	0	
II.1.5	Layanan Hubungan Media		Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	4	3.437.940.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda	Rekomendasi	1	224.817.400	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II.1.6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	350	950.000.000	Diseminasi Informasi		komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				
II.1.7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	2	0	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	86,07	0	
II.1.8	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	50	660.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	8	1.816.676.010	
II.1.9							Penyusunan Konten		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	1	430.377.500	
II.1.10							Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	12	166.800.900	
III	Program: Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	Diskominfo Kota Bogor	Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penilaian SPBE	Indeks	3,50	20.546.205.600	Program: Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	150	0	
			Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks	3,70				Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penilaian SPBE	Indeks	3,50	4.267.406.112	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks	3,00				Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks	3,70		
			Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Indeks	2,88				Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks	3,00		
			Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas	Indeks	3,46				Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Indeks	2,88		
									Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas	Indeks	3,46		
III.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Persentase Pengelolaan Domain	%	100	15.862.792.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Persentase Pengelolaan Domain	%	100	67.188.400	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Persentase Perangkat Daerah yang terhubung Fiber Optik milik Pemerintah Kota Bogor	%	100								
			Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4								
			Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	Level	2								
III.1.1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	67.188.400	
III.1.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Kabupaten		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	370.000.000							
III.1.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	158	15.492.792.000							

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III.2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3	4.683.413.600	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3	4.200.217.712	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Level	3				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Level	3		
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3		
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Level	3				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Level	3		
			Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3				Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	3		
			Penyelenggaraan Evaluasi SPBE	Dokumen	2				Penyelenggaraan Evaluasi SPBE	Dokumen	2		
			Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	2				Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	2		
			Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	2				Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	2		
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Level	4				Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Level	4		
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Level	4				Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Level	4		
			Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level	2				Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Level	3		
			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	Level	3				Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level	2		
			Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Level	3				Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	Level	2		
			Penyediaan Sumber Daya Multimedia TIK	Dokumen	1				Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Level	3		
			Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3				Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3		
			Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	2				Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	2		
			Penyelenggaraan Evaluasi Kota Cerdas	Indeks	3,46				Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level	4		
									Penyelenggaraan Evaluasi Kota Cerdas	Indeks	3,46		
III.2.1	Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	81.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	4	65.194.200	
III.2.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	181.500.000,0	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	3	508.129.250,0	
III.2.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	2	1.248.000.000	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi		Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	1	0	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III.2.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	121.000.000	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	1	0	
III.2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	1	36.500.000,0	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	1	0,0	
III.2.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	5	36.500.000,0	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	15	296.842.500,0	
III.2.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	1.174.413.600	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	4	0	
III.2.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	5	45.000.000	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen	1	0	
III.2.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	653.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	36	754.518.362	
III.2.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	883.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	2	0	
III.2.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	27.500.000,0	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program	3	0	
III.2.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	196.000.000	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	36	2.575.533.400	
IV	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo Kota Bogor	Indeks Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	2,75	586.654.500	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo Kota Bogor	Indeks Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	2,75	276.565.900	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
		Indeks Kualitas Data	Indeks	2,66	Indeks Kualitas Data				Indeks	2,66			
		Indeks Proses Bisnis Statistik	Indeks	3,00	Indeks Proses Bisnis Statistik				Indeks	3,00			
		Indeks Kelembagaan	Indeks	2,85	Indeks Kelembagaan				Indeks	2,85			
		Indeks Statistik Nasional	Indeks	2,22	Indeks Statistik Nasional				Indeks	2,22			
IV.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Indeks Standar Data Statistik	Indeks	3,00	586.654.500	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Indeks Standar Data Statistik	Indeks	3,00	276.565.900	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
		Indeks Metadata Statistik	Indeks	3,00	Indeks Metadata Statistik				Indeks	3,00			
		Indeks Interoperabilitas Data	Indeks	3,00	Indeks Interoperabilitas Data				Indeks	3,00			
		Indeks Kode Referensi dan/atau Data Induk	Indeks	2,00	Indeks Kode Referensi dan/atau Data Induk				Indeks	2,00			
		Indeks Relevansi	Indeks	2,40	Indeks Relevansi				Indeks	2,40			
		Indeks Akurasi	Indeks	3,00	Indeks Akurasi				Indeks	3,00			
		Indeks Aktualisasi dan Ketepatan Waktu	Indeks	2,50	Indeks Aktualisasi dan Ketepatan Waktu				Indeks	2,50			
		Indeks Aksesibilitas	Indeks	3,00	Indeks Aksesibilitas				Indeks	3,00			

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Indeks Keterbandingan dan Konsistensi	Indeks	2,50				Indeks Keterbandingan dan Konsistensi	Indeks	2,50		
			Indeks Perencanaan Data	Indeks	2,33				Indeks Perencanaan Data	Indeks	2,33		
			Indeks Pengumpulan Data	Indeks	3,00				Indeks Pengumpulan Data	Indeks	3,00		
			Indeks Pemeriksaan Data	Indeks	4,00				Indeks Pemeriksaan Data	Indeks	4,00		
			Indeks Penyebarluasan Data	Indeks	3,00				Indeks Penyebarluasan Data	Indeks	3,00		
			Indeks Profesionalitas	Indeks	3,00				Indeks Profesionalitas	Indeks	3,00		
			Indeks SDM yang Memadai dan Kapabel	Indeks	2,50				Indeks SDM yang Memadai dan Kapabel	Indeks	2,50		
			Indeks Pengorganisasian Statistik	Indeks	3,00				Indeks Pengorganisasian Statistik	Indeks	3,00		
			Indeks Pemanfaatan Data Statistik	Indeks	2,67				Indeks Pemanfaatan Data Statistik	Indeks	2,67		
			Indeks Pengelolaan Kegiatan Statistik	Indeks	2,00				Indeks Pengelolaan Kegiatan Statistik	Indeks	2,00		
			Indeks Penguatan SSN Berkelanjutan	Indeks	1,99				Indeks Penguatan SSN Berkelanjutan	Indeks	1,99		
IV.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	137.945.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	80	95.806.800	
IV.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	80	224.602.000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	100	55.694.200	
IV.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	2	96.188.000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	80	40.046.000	
IV.1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	72	0	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	2	85.018.900	
IV.1.5	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	127.919.500	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	1	0	
IV.1.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	0							
V	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo Kota Bogor	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	2	2.600.000.000	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo Kota Bogor	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	2	625.151.900	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
V.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Persentase Penerapan Tingkat Keamanan Informasi	%	79	2.450.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Persentase Penerapan Tingkat Keamanan Informasi	%	79	625.151.900	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
V.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	300.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	0	
V.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	
V.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	Laporan	1	1.500.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	Laporan	1	625.151.900	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
V.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	36	650.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	36	0	
V.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah	Diskominfo Kota Bogor	Persentase PD yang aktif menggunakan komunikasi sandi (email Kota Bogor)	%	97	150.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kota Bogor	Persentase PD yang aktif menggunakan komunikasi sandi (email Kota Bogor)	%	97	0	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
V.2.1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	35	150.000.000	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskominfo Kota Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	35	0	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>						<b>51.326.630.591</b>						<b>23.813.647.049</b>	

Sumber : Diskominfo Tahun 2024

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Diskominfo Kota Bogor akan mengkaji dan menambah usulan program dan kegiatan dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Diskominfo Kota Bogor dalam pembuatan program kegiatan berusaha untuk memperhatikan usulan-usulan dalam pelaksanaan Musrembang Kecamatan sedangkan untuk usulan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Bogor maka usulan kegiatan tersebut diarahkan kepada Dinas yang terkait.

**Tabel 2.9. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Bogor**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>NIHIL</b>			

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR**

**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas dibidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat Indonesia yang informatif.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Sebagai leading sektor dibidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berfokus pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah merancang dan menyusun berbagai program/kegiatan berazaskan pada peningkatan jangkauan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR**

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor memiliki peran pada pencapaian Fokus Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026 pada tujuan 4 **“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan”** dan sasaran berupa **“Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif”**.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor adalah sebagai berikut :

**Tujuan 1** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah

**Tujuan 2** : Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

Sasaran 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik

Sasaran 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

Sasaran 3 : Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan data statistik sektoral

Sasaran 4 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja ini adalah demi pencapaian Fokus Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.. Selain itu faktor penunjang lainnya adalah pencapaian target renstra Perangkat Daerah dan wujud nyata pengimplementasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor pada Tahun 2025 akan melaksanakan 3 urusan yang terbagi ke dalam 5 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Pagu Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor pada Tahun 2025, mengalami penyesuaian dibandingkan dengan pagu pada rancangan awal RKPD menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini berakibat adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan adanya pengurangan kuantitas output sub kegiatan, serta adanya penambahan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Namun demikian diharapkan target capaian program, sasaran dan tujuan perangkat daerah tetap dapat dipenuhi.

Adapun rincian urusan, program dan sub kegiatan tergambarakan dalam tabel berikut :

**Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Bogor**

kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01	Program: penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	Diskominfo Kota Bogor	27,57	8.392.800	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	27,57
				Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai		27,00				27
				Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	Nilai		11,65				11,65
				Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	Nilai		22,50				22,5
				Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%		100				100
				Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%		100	12.557.744.983	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	100
				Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%		94				94

kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Persentase kepatuhan anggaran	%		100				100						
		Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	%		95				95						
		Transparansi pengelolaan keuangan daerah	%		94				94						
		Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Nilai	Diskominfo Kota Bogor	85,00	3.439.713.544	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	85						
		Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai		81,25				82,5						
		Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan	Nilai		82,50				82,75						
		Rata-Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai		95,00				95,25						
2	16	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	Diskominfo Kota Bogor	A	8.392.800	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	A		
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai								
						Persentase realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	%		95					95	
						Persentase realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	%		95				95		
2	16	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Diskominfo Kota Bogor	9	8.392.800			9	
2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Diskominfo Kota Bogor	1	12.557.744.983	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	1	
2	16	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Diskominfo Kota Bogor	65	12.490.891.783			65	

kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 16 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		12	66.853.200			12	
2 16 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	Diskominfo Kota Bogor	1	334.327.217	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	1	
2 16 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Diskominfo Kota Bogor	1	6.117.600			1	
2 16 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5	105.000.000			5	
2 16 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	15.494.617			1	
2 16 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	207.715.000			1	
2 16 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	Diskominfo Kota Bogor	1	2.721.127.032	PAD	Disediakan dengan kebutuhan	1	
2 16 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	9.000.000			1	

kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 16 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	2.712.127.032			1	
2 16 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	Diskominfo Kota Bogor	2	384.259.295	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	2	
2 16 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Diskominfo Kota Bogor	13	232.968.910			15	
2 16 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		150	151.290.385			150	
2 16 02	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	Diskominfo Kota Bogor	93	2.638.671.810	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	93	
		Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	%		80				90	
2 16 02 2 01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media internal, media sosial dan website	%	Diskominfo Kota Bogor	100	2.638.671.810	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	100	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD	%		94				94	
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	%		93				93	
		Persentase PPID PD yang aktif	%		90				90	

kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Jumlah Kemitraan Media Cetak, Online, Radio dan TV	Tayang		500				600							
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	%		90				90							
2	16	02	2	01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	Diskominfo Kota Bogor	1	224.817.400				1	
2	16	02	2	01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media		8	1.816.676.010				8	
2	16	02	2	01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen		1	430.377.500				1	
2	16	02	2	01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten		12	166.800.900				12	
2	16	03				Program: Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penilaian SPBE	Indeks	Diskominfo Kota Bogor	3,50	4.267.406.112	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	3,5		
						Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indeks			3,70				3,7		
						Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Indeks			3,00				3		
						Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE	Indeks			2,88				2,88		
						Nilai Evaluasi Implementasi Program Kota Cerdas	Indeks			3,46				3,46		

kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 16 03 2 01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain	%	Diskominfo Kota Bogor	100	67.188.400	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	100	
2 16 03 2 01 0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	Diskominfo Kota Bogor	1	67.188.400			1	
2 16 03 2 02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	Diskominfo Kota Bogor	3	4.200.217.712	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	3	
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Level		3				3	
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level		3				3	
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	Level		3				3	
		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level		3				3	
		Penyelenggaraan Evaluasi SPBE	Dokumen		2				2	

kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level		2				2							
		Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level		2				2							
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Level		4				4							
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Level		4				4							
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Level		2				3							
		Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	Level		3				2							
		Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur	Level		3				2							
		Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Level		1				3							
		Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level		3				3							
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level		2				2							
		Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Level		3,46				4							
		Penyelenggaraan Evaluasi Kota Cerdas	Indeks						3,46							
2	16	03	2	02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	Diskominfo Kota Bogor	4	65.194.200				4	
2	16	03	2	02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen		3	508.129.250,0				3	

kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 16 03 2 02 0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi		15	296.842.500,0			15	
2 16 03 2 02 0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah		36	754.518.362			36	
2 16 03 2 02 0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah		36	2.575.533.400			36	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2 20 2	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	Diskominfo Kota Bogor	2,75	276.565.900	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	2,75	
		Indeks Kualitas Data	Indeks		2,66				2,66	
		Indeks Proses Bisnis Statistik	Indeks		3,00				3,1	
		Indeks Kelembagaan	Indeks		2,85				2,85	
		Indeks Statistik Nasional	Indeks		2,22				2,22	
2 20 02 2 01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Standar Data Statistik	Indeks	Diskominfo Kota Bogor	3,00	276.565.900	PAD	Diesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	3	
		Indeks Metadata Statistik	Indeks		3,00				3	
		Indeks Interoperabilitas Data	Indeks		3,00				3	
		Indeks Kode Referensi dan/atau Data Induk	Indeks		2,00				2	
		Indeks Relevansi	Indeks		2,40				2,4	
		Indeks Akurasi	Indeks		3,00				3	
		Indeks Aktualisasi dan Ketepatan Waktu	Indeks		2,50				2,5	

kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Indeks Aksesibilitas	Indeks		3,00				3						
		Indeks Keterbandingan dan Konsistensi	Indeks		2,50				2,5						
		Indeks Perencanaan Data	Indeks		2,33				2,67						
		Indeks Pengumpulan Data	Indeks		3,00				3						
		Indeks Pemeriksaan Data	Indeks		4,00				4						
		Indeks Penyebarluasan Data	Indeks		3,00				3						
		Indeks Profesionalitas	Indeks		3,00				3						
		Indeks SDM yang Memadai dan Kapabel	Indeks		2,50				2,5						
		Indeks Pengorganisasian Statistik	Indeks		3,00				3						
		Indeks Pemanfaatan Data Statistik	Indeks		2,67				2,67						
		Indeks Pengelolaan Kegiatan Statistik	Indeks		2,00				2						
		Indeks Penguatan SSN Berkelanjutan	Indeks		1,99				1,99						
2	20	02	2	01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Diskominfo Kota Bogor	80	95.806.800			80	
2	20	02	2	01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase		100	55.694.200			100	
2	20	02	2	01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase		80	40.046.000			85	
2	20	02	2	01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen		2	85.018.900			2	

kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	21									
2	21	02								
2	21	02	2	01						
2	21	02	2	01	0003					
						<b>23.813.647.049</b>				-

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor pada Tahun 2025 akan melaksanakan 3 urusan yang terbagi ke dalam 5 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Adapun untuk pendanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 sebesar Rp. 23.813.647.049,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah), yang secara rinci dapat dijelaskan dalam tabel 4 berikut :

**Tabel 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Output secara rinci	Bidang Pengampu
1	2	3	4	5
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.005.851.327</b>		Sekretariat
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.392.800</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.392.800	Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.557.744.983</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.490.891.783	Gaji ASN 1 tahun sesuai SE	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	66.853.200	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>334.543.694</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.117.600	Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.000.000	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.711.094	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.715.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Mamin rapat	
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.721.127.032</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	Belanja tagihan telepon	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.712.127.032	1. Tenaga Pendukung Teknis 2. Tenaga Kebersihan 3. Tenaga Supir 4. Iuran Jaminan/Asuransi	
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>384.042.818</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.442.886	1. Pembayaran Pajak Kendaraan 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.599.932	1. Pemeliharaan AC 2. Pemeliharaan PC/Laptop 3. Pemeliharaan Printer	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Output secara rinci	Bidang Pengampu
1	2	3	4	5
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>2.638.671.810</b>		Bidang IKP
1	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.638.671.810</b>		
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	224.817.400	1. Pengembangan dan Perawatan Aplikasi Sibadra 2. Sewa Aplikasi NTPD 112 3. Belanja Cetak Dokumen PPID dan Keterbukaan Informasi Publik	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.816.676.010	1. Publikasi radio lokal 2. media cetak lokal 3. media online lokal 4. media online nasional 5. Jumpa Pers 6. Redaktur menulis 7. Booklet Smart City	
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	430.377.500	Pengelolaan media sosial	
	Penyusunan Konten	166.800.900	Pembuatan Konten Multimedia	
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>4.267.406.112</b>		Bidang JDP Bidang Egov
1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>67.188.400</b>		Bidang JDP
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	67.188.400	1. Perpanjangan pendaftaran nama domain kotabogor.go.id ke PANDI 2. Pembayaran IP Publik ke APJII	
2	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.200.217.712</b>		Bidang Egov
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	65.194.200	Pendampingan Monev SPBE	
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	508.129.250	1. Penyediaan Layanan Ekosistem Pusat Data Pemerintah 2. Sewa Data Recovery Center 3. Pemeliharaan Perangkat Pusat Data 4. Perpanjangan lisensi akun aplikasi teleconference Zoom milik Pemerintah Kota Bogor 5. Layanan multimedia Bogor Green Room	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	296.842.500	1. Lisensi Hak Pakai Webmail Kota Bogor 2. Sewa Layanan Colocation Server Webmail 3. Pengembangan Super Apps Layanan Publik Kota Bogor versi Mobile 4. Penyediaan Layanan Whatsapp Business API 5. Sosialisasi Pengembangan Aplikasi	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	754.518.362	1. Pembangunan jaringan FO 2. Pemeliharaan jaringan internet dan intranet 3. Pengadaan barang jaringan 4. Pengelolaan dan pemeliharaan CCTV 5. Penggantian jaringan utilitas bersama (ducting) sepanjang Jalan Otista	
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	2.575.533.400	Bandwidth 1 tahun	
IV	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>276.565.900</b>		<b>Bidang SS</b>

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Output secara rinci	Bidang Pengampu
1	2	3	4	5
1	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>276.565.900</b>		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	95.806.800	Sosialisasi Portal Data	
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	55.694.200	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Portal Data	
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	40.046.000	1. Penyusunan Buku Induk Statistik Sektoral 2. Asistensi Kebutuhan Data Sektoral	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	85.018.900	Penyusunan Metadata Statistik Sektor 1 dan Sektor 2	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>625.151.900</b>		<b>Bidang JDP</b>
1	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>625.151.900</b>		
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	625.151.900	1. Perangkat Firewall 2. Lisensi Antivirus 3. Lisensi Firewall 4. Lisensi SSL	
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.813.647.049</b>		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas serta memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya guna mendukung tercapainya target perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan-usulan dari para pemangku kepentingan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Tahun 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam melaksanakan dan mengimplementasikannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.